



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 33/M-DAG/PER/8/2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 telah menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Produsen pupuk;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk Urea Bersubsidi oleh Produsen Pupuk serta dengan telah beroperasinya secara penuh unit produksi I A dan I B PT. Pupuk Kujang, perlu mengubah Daftar Produsen Penanggung Jawab dan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44556);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/Per/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

Pasal 1

Mengubah Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sehingga menjadi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan perubahan wilayah tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus wilayah Propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini huruf A angka II Nomor 1, 2, 3 dan 4, berlaku mulai tanggal 1 September 2007.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan ini :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 Dan Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3 /2007 Tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/ PER/10/2006; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal : 16 Agustus 2007

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.

DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN DALAM NEGERI




ARDIANSYAH PARMAN

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2007
 Tanggal : 16 Agustus 2007

**DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
A.	PUPUK UREA				
I.	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.	Aceh Selatan
				2.	Aceh Tenggara
				3.	Aceh Timur
				4.	Aceh Tengah
				5.	Aceh Barat
				6.	Aceh Besar
				7.	Pidie
				8.	Pidie Jaya
				9.	Aceh Utara
				10.	Simeulue
				11.	Aceh Singkil
				12.	Bireuen
				13.	Aceh Barat Daya
				14.	Gayolues
				15.	Aceh Jaya
				16.	Nagan Raya
				17.	Aceh Tamiang
				18.	Bener Meriah
				19.	Subulussalam
				20.	Kota Subulussalam
				21.	Kota Banda Aceh
				22.	Kota Sabang
				23.	Kota Lhokseumawe
				24.	Kota Langsa
		2.	SUMATERA UTARA	1.	Tapanuli Tengah
				2.	Tapanuli Utara
				3.	Tapanuli Selatan
				4.	Nias
				5.	Langkat
				6.	Karo
				7.	Deli Serdang
				8.	Simalungun
				9.	Asahan
				10.	Labuhan Batu
				11.	Dairi
				12.	Toba Samosir
				13.	Mandailing Natal
				14.	Nias Selatan
				15.	Pakpak Barat
				16.	Humbang Hasundutan
				17.	Samosir
				18.	Serdang Bedagei
				19.	Kota Medan
				20.	Kota Pematang Siantar
				21.	Kota Sibolga
				22.	Kota Tanjung Balai
				23.	Kota Binjai
				24.	Kota Tebing Tinggi
				25.	Kota Padangsidempuan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		3.	SUMATERA BARAT	1.	Pesisir Selatan
				2.	Solok
				3.	Sawah Lunto/Sijunjung
				4.	Tanah Datar
				5.	Padang Pariaman
				6.	Agam
				7.	Lima Puluh Kota
				8.	Pasaman
				9.	Kep. Mentawai
				10.	Dharmasraya
				11.	Solok Selatan
				12.	Pasaman Barat
				13.	Kota Padang
				14.	Kota Solok
				15.	Kota Sawahlunto
				16.	Kota Padang Panjang
				17.	Kota Bukittinggi
				18.	Kota Payakumbuh
				19.	Kota Pariaman
		4.	RIAU	1.	Kampar
				2.	Indragiri Hulu
				3.	Bengkalis
				4.	Indragiri Hilir
				5.	Palalawan
				6.	Rokan Hulu
				7.	Rokan Hilir
				8.	Siak
				9.	Kuantan Sengingi
				10.	Kota Pekanbaru
				11.	Kota Dumai
		5.	KEPULAUAN RIAU	1.	Kepulauan Riau
				2.	Karimun
				3.	Natuna
				4.	Lingga
				5.	Kota Batam
				6.	Kota Tanjung Pinang
		6.	JAMBI	1.	Kerinci
				2.	Merangin
				3.	Sarolangun
				4.	Batang Hari
				5.	Muaro Jambi
				6.	Tanjung Jabung Barat
				7.	Tanjung Jabung Timur
				8.	Bungo
				9.	Tebo
				10.	Kota Jambi
		7.	SUMATERA SELATAN	1.	Ogan Komering Ulu
				2.	Ogan Komering Ilir
				3.	Muara Enim
				4.	Lahat
				5.	Musi Rawas

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
				6.	Musi Banyuasin
				7.	Banyuasin
				8.	OKU Timur
				9.	OKU Selatan
				10.	Ogan Ilir
				11.	Empat Lawang
				12.	Kota Palembang
				13.	Kota Pagar Alam
				14.	Kota Lubuk Linggau
				15.	Kota Prabumulih
		8.	BANGKA BELITUNG	1.	Bangka
				2.	Belitung
				3.	Bangka Selatan
				4.	Bangka Tengah
				5.	Bangka Barat
				6.	Belitung Timur
				7.	Kota Pangkal Pinang
		9.	BENGKULU	1.	Bengkulu Selatan
				2.	Rejang Lebong
				3.	Bengkulu Utara
				4.	Kaur
				5.	Seluma
				6.	Muko-muko
				7.	Lebong
				8.	Kepahlang
				9.	Kota Bengkulu
		10.	LAMPUNG	1.	Lampung Selatan
				2.	Lampung Tengah
				3.	Lampung Utara
				4.	Lampung Barat
				5.	Tulang Bawang
				6.	Tanggamus
				7.	Lampung Timur
				8.	Way Kanan
				9.	Kota Bandar Lampung
				10.	Kota Metro
		11.	JAWA TENGAH I	1.	Cilacap
				2.	Banyumas
				3.	Purbalingga
				4.	Banjarnegara
				5.	Kebumen
				6.	Purworejo
				7.	Wonosobo
				8.	Temanggung
				9.	Magelang
				10.	Kota Magelang
		12.	D. I. JOGJAKARTA	1.	Kulon Progo
				2.	Bantul
				3.	Gunung Kidul
				4.	Sleman
				5.	Kota Jogjakarta

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		13.	KALIMANTAN BARAT	1.	Sambas
				2.	Pontianak
				3.	Sanggau
				4.	Ketapang
				5.	Sintang
				6.	Kapuas Hulu
				7.	Bangkayang
				8.	Landak
				9.	Melawi
				10.	Sekadau
				11.	Kayong Utara
				12.	Kota Pontianak
				13.	Kota Singkawang
II.	PT. PUPUK KUJANG	1.	BANTEN	1.	Pandeglang
				2.	Lebak
				3.	Tangerang
				4.	Serang
				5.	Kota Tangerang
				6.	Kota Cilegon
		2.	DKI JAKARTA	1.	Adm. Kep. Seribu
				2.	Jakarta Pusat
				3.	Jakarta Utara
				4.	Jakarta Barat
				5.	Jakarta Selatan
				6.	Jakarta Timur
		3.	JAWA BARAT	1.	Bogor
				2.	Sukabumi
				3.	Cianjur
				4.	Bandung
				5.	Bandung Barat
				6.	Garut
				7.	Tasikmalaya
				8.	Ciamis
				9.	Kuningan
				10.	Cirebon
				11.	Majalengka
				12.	Indramayu
				13.	Subang
				14.	Purwakarta
				15.	Karawang
				16.	Bekasi
				17.	Kota Bogor
				18.	Kota Sukabumi
				19.	Kota Bandung
				20.	Kota Cirebon
				21.	Kota Bekasi
				22.	Kota Depok
				23.	Kota Tasikmalaya
				24.	Kota Cimahi
				25.	Kota Banjar
		4.	JAWA TENGAH III	1.	Brebes
				2.	Tegal
				3.	Pemalang
				4.	Batang
				5.	Pekalongan
				6.	Kota Tegal
				7.	Kota Pekalongan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
III.	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR	1.	JAWA TENGAH II	1.	Boyolali
				2.	Klaten
				3.	Sukoharjo
				4.	Wonogiri
				5.	Karanganyar
				6.	Sragen
				7.	Grobogan
				8.	Blora
				9.	Rembang
				10.	Pati
				11.	Kudus
				12.	Jepara
				13.	Demak
				14.	Semarang
				15.	Kendal
				16.	Kota Surakarta
				17.	Kota Salatiga
				18.	Kota Semarang
		2.	JAWA TIMUR II	1.	Surabaya
				2.	Trenggalek
				3.	Tulung Agung
				4.	Blitar
				5.	Kediri
				6.	Malang
				7.	Lumajang
				8.	Jember
				9.	Banyuwangi
				10.	Bondowoso
				11.	Situbondo
				12.	Probolinggo
				13.	Pasuruan
				14.	Sidoharjo
				15.	Mojokerto
				16.	Jombang
				17.	Nganjuk
				18.	Bangkalan
				19.	Sampang
				20.	Pamekasan
				21.	Sumenep
				22.	Kota Kediri
				23.	Kota Blitar
				24.	Kota Malang
				25.	Kota Probolinggo
				26.	Kota Pasuruan
				27.	Kota Mojokerto
				28.	Kota Surabaya
				29.	Kota Batu
		3.	KALIMANTAN TENGAH	1.	Kotawaringin Barat
				2.	Kotawaringin Timur
				3.	Kapuas
				4.	Barito Selatan
				5.	Barito Timur
				6.	Barito Utara
				7.	Katingan
				8.	Seruyan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
				9.	Sukamara
				10.	Lamandau
				11.	Gunung Mas
				12.	Pulang Pisau
				13.	Murunggraya
				14.	Kota Palangkaraya
		4.	KALIMANTAN SELATAN	1.	Tanah Laut
				2.	Kota Baru
				3.	Banjar
				4.	Barito Kuala
				5.	Tapin
				6.	Hulu Sungai Selatan
				7.	Hulu Sungai Tengah
				8.	Hulu Sungai Utara
				9.	Tabalong
				10.	Tanah Bambu
				11.	Balangan
				12.	Kota Banjarmasin
				13.	Kota Banjarbaru
		5.	KALIMANTAN TIMUR	1.	Pasir
				2.	Kutai Kertanegara
				3.	Berau
				4.	Bulungan
				5.	Nunukan
				6.	Malinau
				7.	Kutai Barat
				8.	Kutai Timur
				9.	Penajam Paser Utara
				10.	Kota Balikpapan
				11.	Kota Samarinda
				12.	Kota Tarakan
				13.	Kota Bontang
		6.	BALI	1.	Jembrana
				2.	Tabanan
				3.	Badung
				4.	Gianyar
				5.	Klungkung
				6.	Bangli
				7.	Karangasem
				8.	Buleleng
				9.	Kota Denpasar
		7.	NUSA TENGGARA BARAT	1.	Lombok Barat
				2.	Lombok Tengah
				3.	Lombok Timur
				4.	Sumbawa
				5.	Dompu
				6.	Bima
				7.	Sumbawa Barat
				8.	Kota Mataram
				9.	Kota Bima

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		8.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.	Kupang
				2.	Timur Tengah Selatan
				3.	Timur Tengah Utara
				4.	Belu
				5.	Alor
				6.	Flores Timur
				7.	Sikka
				8.	Ende
				9.	Ngada
				10.	Manggarai
				11.	Sumba Timur
				12.	Sumba Barat
				13.	Lembata
				14.	Rotendao
				15.	Manggarai Barat
				16.	Sumba Barat Daya
				17.	Kota Kupang
		9.	SULAWESI UTARA	1.	Bolang Mongondow
				2.	Bolaang Mongondow Utara
				3.	Minahasa
				4.	Kep. Sangihe
				5.	Kep. Talaud
				6.	Minahasa Selatan
				7.	Minahasa Utara
				8.	Minahasa Tenggara
				9.	Kota Kotamobogu
				10.	Kota Manado
				11.	Kota Bitung
				12.	Kota Tomohon
		10.	SULAWESI TENGAH	1.	Banggai
				2.	Poso
				3.	Donggala
				4.	Toli-toli
				5.	Buol
				6.	Morowali
				7.	Banggai Kepulauan
				8.	Parigi Moutong
				9.	Tojo Una Una
				10.	Kota Palu
		11.	SULAWESI SELATAN	1.	Selayar
				2.	Bulukumba
				3.	Bantaeng
				4.	Jeneponto
				5.	Takalar
				6.	Gowa
				7.	Sinjai
				8.	Bone
				9.	Maros
				10.	Pangke Jane Kepulauan
				11.	Barru
				12.	Soppeng
				13.	Wajo
				14.	Sidenreng Rapang
				15.	Pinrang
				16.	Enrekang
				17.	Luwu
				18.	Tana Toraja

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			19. Polewali Mamasa
			20. Majene
			21. Mamuju
			22. Luwu Utara
			23. Mamasa
			24. Luwu Timur
			25. Mamojo Utara
			26. Kota Makassar
		12. SULAWESI TENGGARA	27. Kota Pare-pare
			28. Kota Palopo
			1. Kolaka
			2. Konawe
			3. Muna
			4. Buton
			5. Konawe Selatan
			6. Bombana
			7. Wakatobi
			8. Kolaka Utara
			9. Konawe Utara
			10. Buton Utara
			11. Kep. Siau Tagulandang Daro
			12. Kota Kendari
			13. Kota Bau - Bau
		13. GORONTALO	1. Gorontalo
			2. Gorontalo Utara
			3. Bualemo
			4. Kota Gorontalo
			5. Bone Bolango
			6. Pohuwato
		14. SULAWESI BARAT	1. Mamuju Utara
			2. Mamuju
			3. Mamasa
			4. Polewali Mamasa
			5. Majane
		15. MALUKU	1. Maluku Tengah
			2. Maluku Tenggara
			3. Maluku Tenggara Barat
			4. Pulau Buru
			5. Seram Bagian Timur
			6. Seram Bagian Barat
			7. Kepulauan Aru
			8. Kota Ambon
		16. MALUKU UTARA	1. Halmahera Barat
			2. Halmahera Tengah
			3. Halmahera Utara
			4. Halmahera Selatan
			5. Kepulauan Sula
			6. Halmahera Timur
			7. Kota Ternate
			8. Kota Kep. Tidore
		17. PAPUA	1. Merauke
			2. Jayawijaya
			3. Jayapura
			4. Nabire
			5. Yapen Waropen
			6. Biak Nunfor

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			7. Puncak Jaya
			8. Piniai
			9. Mimika
			10. Sarmi
			11. Keerom
			12. Pegunungan Bintang
			13. Yahukimo
			14. Tolikara
			15. Waropen
			16. Bovendigoel
			17. Mappi
			18. Asmat
			19. Supiori
			20. Membramo Raya
			21. Kota Jayapura
		18. IRIAN JAYA BARAT	1. Sorong
			2. Manokwari
			3. Fak - Fak
			4. Sorong Selatan
			5. Raja Ampat
			6. Teluk Bentuni
			7. Teluk Wondana
			8. Kaimana
			9. Kota Sorong
IV.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	1. JAWA TIMUR I	1. Pacitan
			2. Ponorogo
			3. Madiun
			4. Magetan
			5. Ngawi
			6. Bojonegoro
			7. Tuban
			8. Lamongan
			9. Gresik
			10. Kota Madiun

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
 DIREKTUR JENDERAL
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI



ARDIANSYAH PARMAN